

185

KAITAN WAWASAN NUSANTARA DENGAN PENGGUNAAN BAHASA CINA DI KALANGAN WNI KETURUNAN CINA

Oleh : Robert Th. Kodong.

PENDAHULUAN

Skripsi Mahasiswa Angkatan XXII/PTIK tahun 1986 ini telah memperoleh bimbingan materi dari Mayor Jenderal Polisi Purnawirawan Drs. Soebadi Sastrosoedjono yang selain dosen juga mantan Gubernur PTIK, dan telah diterima serta dinyatakan memenuhi syarat LULUS oleh Ketua Dewan Penguji skripsi yakni Prof. Dr. T.O. Ihromi, SH, MA. Penulis skripsi (Robert Th. Kodong) menuangkan analisisnya dalam 102 halaman yang terbagi dalam 6 bab, didahului Kata Pengantar dan Daftar Isi sebanyak 9 halaman dan diakhiri dengan lampiran-lampiran pada 34 halaman terakhir.

Sampai halaman 63 (Bab IV) belum disentuh hakekat keterkaitan penggunaan Bahasa Cina tersebut dengan Wawasan Nusantara. Analisis utama baru dalam bab V sebanyak 12 halaman, ditutup dengan Kesimpulan dan Saran dalam 3 halaman. Penulis telah mencoba mengangkat permasalahan lokal Medan menjadi permasalahan nasional yakni dengan masih dipergunakannya Bahasa Cina di lingkungannya sejauh manakah penji-

waan dan aplikasi Wawasan Nusantara bagi WNI Keturunan Cina di Medan.

PENGGUNAAN BAHASA CINA DI KALANGAN MASYARAKAT KETURUNAN CINA DI WILAYAH HUKUM POLTABES MEDAN.

Bab III skripsi ini dideskripsikan ke dalam dua sub-bab yakni Situasi dan Kondisi Wilayah Hukum Poltabes Medan dan Masyarakat Keturunan Cina dan Penggunaan Bahasa Cina.

Situasi dan Kondisi Wilayah Poltabes Medan.

Situasi dan Kondisi wilayah Poltabes tidak dipaparkan secara Astagatra melainkan berdasarkan visi penulis yang menonjol, yakni:

1. Geografi.
2. Demografi.
3. Sumber daya alam.
4. Pemerintahan.
5. Ideologi dan Politik.
6. Ekonomi.
7. Sosial Budaya.
8. Kriminalitas.

*) Disunting oleh Imam Soedjono, Staf Redaksi "Bhayangkara".

Bidang Sosial Budaya khususnya di sub-bidang Kebudayaan terdapat data valid strategik yakni bahwa eksistensi Dewan Kesenian Medan yang didirikan tanggal 28 Juli 1972 dan diharapkan mampu membantu Pemerintah Daerah dalam mengembangkan seni budaya daerah ternyata belum berhasil. Padahal sejak tahun 1975 telah memperoleh fasilitas kesenian berupa Taman Tapian Daya, yang diresmikan oleh Presiden Soeharto.

Di bidang Kriminalitas kejahatan dengan kekerasan tercatat sebagai yang menonjol, terutama karena masalah-masalah yang timbul karena adanya kedai-kedai tuak/minuman keras, pengangguran, dan premanisme. Premanisme ini bagai jalan tak ada ujung, sulit diberantas karena para korban/terancam takut melapor kuatir akan keselamatan dirinya. Di bidang Ekonomi dimana keturunan Cina memegang kendali, dilukiskan secara implisit dalam dua kalimat.

Masyarakat Keturunan Cina dan Penggunaan Bahasa Cina.

Ada tujuh wilayah pemukiman dimana WNI keturunan Cina dan WNA Cina mendominasi jumlah kependudukan sekaligus menguasai kehidupan bidang perdagangan dan ekonomi, yaitu:

1. Wilayah Polsekta Medan Kota.
2. Wilayah Polsekta Teladan, khusus pertokoan.

3. Wilayah Polsekta Medan Baru, khusus pusat-pusat perbelanjaan/hiburan.
4. Wilayah Polsekta Medan Timur sekitar pasar/pusat perbelanjaan.
5. Wilayah Polsekta Medan Barat, sekitar pasar/pusat perbelanjaan dan transit hasil-hasil laut dari Belawan.
6. Bidang usaha pertanian, perkebunan, hasil laut, dan industri di Wilayah Polsekta yang lain.
7. Rumah-rumah penampungan WNI dan WNA seperti: Rumah Miskin Tionghoa Labuhan Deli, Kampung Sei Agul, Kampung Tanjung Mulya, Kampung Lalang, Kampung Purwodadi, dan Kampung Mulyorejo.

Dalam pada itu pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1980 tentang Bukti Kewarganegaraan RI telah terganggu oleh banyaknya pelanggaran terhadap persyaratan yang telah ditentukan, diantaranya berbagai pemilikan Surat Bukti Kewarganegaraan RI oleh: mereka yang pernah berstatus kebangsaan RI, mereka yang telah memperoleh "exit-permit only", mereka yang telah memiliki surat-surat bukti asing seperti Surat Tanda Penerimaan (STP), Surat Keterangan Kependudukan (SKK), dan Surat Pendaftaran Orang Asing (SPOA). Dan dari perhitungan berdasarkan Surat Tanda Melapor Diri (STMD) maka diperoleh angka sebagai berikut:

- Yang telah mengembalikan STMD (Pemegang SBKRI): 22.118 orang.
- Yang sah menjadi WNI sesuai Keppres 13/1980 : 6.090 orang.
- Yang masih tercatat sebagai pemegang STMD: 65.735 orang.

Team Pemberangkatan WN RRC Daerah Tingkat I Sumatera Utara medio tahun 1978 masih menampung 889 Kepala Keluarga atau 4.843 orang.

Kondisi sosial budaya masyarakat Cina baik yang WNI maupun WNA dapat dilihat dari data kependidikan, keagamaan, dan penggunaan bahasa Cina di lingkungannya sebagai berikut :

Data kependidikan/sekolah.

Pemusatan pendidikan dan belajar keturunan Asing dalam satu sekolah atau lembaga pendidikan tidak dibenarkan. Untuk membina penghayatan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia bagi WNI serta WNA didirikanlah "Sekolah-Sekolah Asimilasi" yang berdasarkan data Intel Poltabes Medan tahun 1986 menunjukkan besarnya prosentase WNI keturunan Asing yakni: 90% dari 4.031 murid TK; 80% dari 27.756 murid SD; 69% dari 13.292 murid SMP; dan 62% dari 10.834 murid SMA. Dengan demikian terdapat sekitar 74% dari 55.913 murid Sekolah Asimilasi di Poltabes Medan adalah WNika.

Data keagamaan.

Agama mereka Budha, diramu

dengan ajaran Khong Hu Cu, dan dijalankan dengan tata cara adat istiadat Cina yang masih nampak tidak saja kuat di dalam pelaksanaan upacara keagamaan tetapi juga dalam seluruh kegiatan hidup mereka seperti perkawinan dan kematian.

Penggunaan Bahasa Cina.

Penggunaan bahasa Cina sangat terasa menonjol di dalam lingkungan keluarga, TK sampai SMA, dan di tempat-tempat hiburan/film. Masalah Cina, termasuk menonjolnya penggunaan bahasa Cina, erat hubungannya dengan kejadian-kejadian yang mengganggu Kamtibmas sebagai berikut:

- Penganiayaan, pembunuhan, pengrusakan terhadap keturunan Cina berikut pemukiman/pemilikan mereka; 10 Desember 1965.
- Pembakaran rumah-rumah mereka di Kampung Baru, tempat penampungan Cina; tahun 1968.
- Pelarangan Kodimtabes terhadap pengibaran bendera RRC yang berakibat penyerangan dan penganiayaan WNIK dan WNA Cina terhadap para Petugas Kodimtabes Medan; September 1970.
- Perkelahian antara orang-orang penduduk Tanah 600 dengan masyarakat Cina di Kecamatan Titipapan, bermula dari masalah

bentrok antara pemain layang-layang anak kedua belah pihak yang berlanjut dengan pembunuhan terhadap seorang pemuda bernama Lubis (dalam suatu duel), yang meluas dengan pembakaran atas rumah-rumah Cina di kecamatan tersebut.

Kerusuhan sempat meluas namun dapat cepat diwaspadai dan ditangkal oleh aparat keamanan. Keresahan demi keresahan timbul karena rasa tidak senang penduduk kepada orang-orang Cina yang tidak mau hidup menyatu/membraur dengan penduduk pribumi.

KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH DI BIDANG PENDIDIKAN

Pendidikan nasional yang berlaku menyeluruh memegang peranan penting dalam pembentukan sikap nasionalisme. Oleh sebab itu kebijaksanaan di bidang kebudayaan harus diawali dengan langkah kebijaksanaan di bidang pendidikan. Untuk itu Pemerintah Indonesia mengeluarkan serangkaian peraturan-peraturan yang menuju tercapainya proses asimilasi kependidikan seluruh WNI keturunan Cina dan sebagainya, dengan penggunaan jalur *Administrasi* serta sekaligus *edukatif*.

Pendidikan Nasional juga mengatur pendidikan asing dengan di-dirikannya Sekolah-Sekolah Asing. Sekolah Asing tersebut hanya untuk warga negara Asing yang ber-

diam sementara (pendatang); dan WNA yang berstatus penduduk tetap di Indonesia dilarang memasukinya. Kebijakan Pemerintah di bidang pendidikan akan menentukan dampak pemakaian bahasa Cina karena adanya Sekolah-Sekolah Asing Cina tersebut menentukan eksistensi serta pengembangan pemakaian bahasa Cina dalam lingkup sosial budaya pada umumnya. Dan kebijaksanaan tersebut tidak terlepas dari faktor historis kependidikan yang dikelompokkan dalam periodisasi sebelum Proklamasi Kemerdekaan RI, periode Kemerdekaan sampai sebelum G.30 S/PKI 1965, dan periode setelah tahun 1965.

Sebelum Proklamasi Kemerdekaan RI.

Sebelum tahun 1900, setelah berlakunya modernisasi sistem pendidikan di negara Cina, Jaman Jepang, Jaman Kemerdekaan sampai sebelum tahun 1954, setelah berlakunya UU Pendidikan Tahun 1954, dan setelah G.30 S/PKI telah memberi warna kepada pasang surut dunia pendidikan bagi masyarakat Cina di Republik Indonesia.

Sebelum tahun 1900 Pemerintah Hindia Belanda sama sekali tidak memberikan perhatian kependidikan kepada masyarakat Cina. Baru beberapa tahun setelah abad ke-20 masyarakat Cina diperkenankan memasuki Sekolah-Sekolah Belanda dengan lowongan terbatas,

harus mengerti bahasa Belanda dan sanggup membayar mahal. Berlakunya modernisasi sistem pendidikan di Daratan Cina maka dengan dukungan kongsi pedagang Cina di Jakarta bernama Sian Hwee didirikanlah sekolah-sekolah Cina di Indonesia tahun 1901 dengan nama Tionghoa Hwee Koan atau Tionghoa Hak Tong atau Chung-hua Hsuent'iang (Sekolah Tionghoa). Sekolah-sekolah Tionghoa Hwee Koan (THHK) bertujuan "agar orang-orang Tionghoa peranakan kembali memperlihatkan adat istiadat, sejarah kebudayaan, dan pandangan hidup Cina". Sekolah-sekolah tersebut cepat populer dan berkembang, sehingga pada tahun 1911 sudah terdapat 93 THHK tersebar di seluruh Indonesia.

Melihat perkembangan tersebut khususnya karena kekuatiran bahwa "masyarakat Cina akan tenggelam ke dalam orbit kebudayaan Cina yang dapat merangsang rasa nasionalisme mereka", maka oleh Belanda didirikan Hollands Chinese School (HCS) pada tahun 1908. Kecuali dengan ijin Direktur Pendidikan maka di HCS yang mempergunakan bahasa pengantar bahasa Belanda itu tidak memperkenankan pemakaian bahasa Cina dan pengajaran kebudayaan Cina. Dalam perkembangannya kemudian HCS tersebut cenderung hanya menerima murid Cina dari golongan/tingkat status sosial tertentu, sehingga anak-anak

Cina peranakan yang miskin mulai memasuki Sekolah-Sekolah Melayu yang mulai bermunculan saat ini.

Pada tahun 1934 harian Hsin Pao menggambarkan kondisi pendidikan Cina di Hindia Belanda sebagai berikut:

- Jumlah Sekolah Cina: 450 buah; jumlah Sekolah Rakyat Belanda bagi orang-orang Cina: 117 buah.
- Jumlah murid Sekolah Cina: 45.000 orang; jumlah murid Sekolah Rakyat Belanda bagi Cina: 23.353 orang.

Tahun 1936 data yang ditulis Puspa Vasanty adalah sebagai berikut: Dari 200.000 anak Cina usia 6.14 tahun, sekitar 98.000 anak menerima pendidikan di berbagai sekolah: 45.000 di Tionghoa Hwee Koan, 23.000 anak di HCS, 3.000 anak di Sekolah Belanda, sisanya di lain-lain Sekolah. Di tingkat Perguruan Tinggi berorientasi pada penguasaan bahasa, ada yang melanjutkan ke Cina, ada yang ke Inggris/Hongkong, serta Belanda.

Pada Jaman Jepang (1942-1945) untuk membatasi pengaruh Barat maka sekolah-sekolah yang berbahasa Belanda dan bahasa Barat lain ditutup. Sejak 1 Agustus 1942 hanya memperbolehkan sekolah-sekolah yang berbahasa Indonesia dan Cina saja. Dalam pada itu perlakuan terhadap orang-orang Cina Totok dan Peranakan di Indonesia, sama kejam dan hina-

nya dengan terhadap Cina Daratan, yang diperangi oleh Jepang pula. Oleh sebab itu Jepang memaksakan penyatuan organisasi-organisasi Totok maupun Peranakan Cina di Indonesia dalam satu wadah Organisasi Serba Guna. Dan oleh Leu Suryadinata disebutkan bahwa di jaman tersebut terjadi proses "Totokisasi" yakni membuka kembali kesempatan bagi orang-orang Cina di Indonesia kesempatan untuk mempergunakan bahasa Cina di sekolah-sekolah yang tadinya berbahasa Belanda. Bahasa dan kebudayaan Cina merasuk kembali dalam kehidupan Cina di Indonesia.

Dari Proklamasi Kemerdekaan sampai G.30 S/PKI.

Sampai dengan sekitar berlakunya UU Pendidikan Nasional 1954 perlakuan di bidang pendidikan masyarakat Cina adalah sebagai berikut:

- Ada persamaan perlakuan antara Cina Totok dengan Peranakan sehingga dalam kekuasaan Pemerintahan Federal yang dikuasai Belanda terdapat Sekolah-Sekolah Cina yang banyak dengan jumlah murid yang besar. Kondisi tahun 1950 terdapat ada 50.000 siswa Cina di Sekolah-Sekolah Indonesia; 250.000 siswa di Sekolah-Sekolah (berbahasa) Cina, yang 150.000 murid di antaranya adalah WNI.

- Tahun 1950 subsidi terhadap sekolah-sekolah yang berbahasa pengantar bahasa Cina dihentikan Pemerintah Indonesia; tahun 1952 dilakukan pengawasan (harus mendaftar ulang dan mengharuskan memberikan pelajaran bahasa Indonesia minimal 4 jam seminggu mulai kelas III SR/SD) administratif dan kebahasaan, sedangkan mengenai buku-buku pegangan diberikan ke-longgaran.

Sampai tahun 1957 kondisi dipersamakannya golongan Cina Totok dan Peranakan disertai subsidi sampai tahun 1950 tersebut telah memperlihatkan sejumlah besar sekolah berbahasa Cina dengan jumlah murid yang amat besar, termasuk di dalamnya WNI keturunan Cina. Sekolah-sekolah tersebut ditangani oleh Badan Permusyawaratan Kewargaan Indonesia (Baperki). Dengan demikian orang-orang Cina dapat memperoleh tiga macam pendidikan yakni: sekolah-sekolah negeri, sekolah yang ditangani oleh Baperki, dan yang ditangani oleh Pekabaran Injil. Dan ketiganya mempergunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. UU Pendidikan Nasional 1954 tidak langsung terasa mengatur eksistensi kependidikan masyarakat Cina, yang berorientasi kepada Nasionalis Cina di Taiwan dan Daratan (RRC).

Karena terdapat bukti adanya dukungan Cina Taiwan/Nasionalis

kepada Pemberontak PRRI maka sejak tahun 1958 hanya sekolah-sekolah berbahasa Cina pro Peking saja yang diijinkan beroperasi dengan sedikit demi sedikit disertai pengawasan administratif dan kebahasaan. Di dunia pendidikan tinggi terdapat pembatasan penerimaan mahasiswa WNA dan WNI keturunan Cina. Oleh sebab itu Baperki pada tahun 1960 mendirikan Universitas Res Publica (Ureca) guna menampung mahasiswa-mahasiswa Cina kedua golongan tersebut. Ureca mempunyai 7 Fakultas di Jakarta dan 3 Fakultas di Surabaya.

Periode setelah G.30 S/PKI.

Keterlibatan Peking dalam kudeta PKI yang gagal tahun 1965 telah membawa dampak yang esensial terhadap perkembangan pendidikan orang-orang Cina di Indonesia. Semua sekolah berbahasa pengantar Cina dan Ureca ditutup.

Dengan Peraturan Presiden No. 8/12/Pres/1/1968 Pemerintah RI memberikan ijin didirikannya sekolah-sekolah bagi Orang Cina Asing oleh Swasta Cina, dengan nama Sekolah Nasional Proyek Khusus (SNPK) yang terealisasi tahun 1969. Persyaratan yang ditentukan: berlaku bagi WNA maupun WNI, siswa WNA tidak boleh lebih dari 40% jumlah murid, dengan guru serta Kepala Sekolah yang berkewarganegaraan RI (WNI). Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa pengantar dan

bahasa Cina boleh diajarkan sebagai salah satu mata pelajaran.

Diajarkannya bahasa Cina dalam sekolah-sekolah SNPK tersebut memperkuat keterikatan mereka terhadap kebudayaan Cina Leluhur, sehingga harian Yin-tu-ni-hsi-ya Jih Pao (Harian Indonesia) melontarkan kritik bahwa SNPK menimbulkan pengelompokan eksklusif orang Cina dan sebenarnya bahasa Cina itu tidak perlu bagi WNI keturunan Cina. SNPK-SNPK tersebut dalam praktek perkembangannya memang sering melakukan pelanggaran antara lain mengenai prosentase jumlah murid WNA.

Kebijaksanaan kependidikan tersebut jelas menyangkut eksistensi bahasa Cina di dunia pendidikan maupun di tengah masyarakat Cina pada umumnya. Dan pasang surut upaya mengurangi penggunaan bahasa Cina dalam masyarakat keturunan Cina adalah sebagai mana tergambar dalam sub-bab berikut.

BAHASA CINA

Bulan April 1958 dengan dalih "tidak dipahami oleh rakyat Indonesia" maka Kasad Jenderal A.H. Nasution mengeluarkan peraturan yang melarang "semua harian yang terbit selain dengan aksara LATIN dan ARAB". Namun dengan alasan yang berkembang yakni agar dapat menyampaikan informasi tentang kebijaksanaan Pemerintah kepada masyarakat keturunan Cina maka

harian beraksara Cina diijinkan terbit kembali.

Setelah G.30 S/PKI hanya satu harian berbahasa dan beraksara Cina yang diijinkan terbit yakni Yin-tu-ni-hsi-ya Jih Pao (Harian Indonesia), dengan harapan suatu saat semua kolom dan halaman harian tadi akan berbahasa Indonesia. Dominasi pemakaian bahasa Cina dalam masyarakat Cina seperti Pontianak memang menonjol. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah telah melaksanakan ketentuan penggunaan bahasa Indonesia dalam wadah Minggu Bahasa Indonesia. Perkembangan kemudian sejak Sumpah Pemuda 1980 Pemerintah telah memutuskan bulan Oktober sebagai Bulan Bahasa yakni Bulan Kegiatan Nasional Kebahasaan, dengan sasaran "meningkatkan ke-gairahan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar".

Bab Kebijaksanaan Pemerintah di Bidang Pendidikan dan Penggunaan bahasa Cina tersebut tertuang di Bab-IV diramu dengan sejumlah rujukan/referensi dalam 13 halaman yang merupakan puncak paparan faktual dalam 63 halaman.

KAITAN WAWASAN NUSANTARA DENGAN PENGGUNAAN BAHASA CINA DI KALANGAN WNI KETURUNAN CINA.

Wawasan Nusantara sesuai GBHN merupakan wawasan kesatuan bagi bangsa Indonesia yang memberikan arah dan tujuan serta memberi-

kan dasar kokoh bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Oleh sebab itu Wawasan Nusantara tersebut memandang kepulauan Indonesia/Nusantara sebagai satu kesatuan politik, satu kesatuan sosial budaya, satu kesatuan ekonomi, dan satu kesatuan pertahanan keamanan.

Wawasan kesatuan tersebut akan mengokohkan persatuan bangsa. Oleh sebab itu kesatuan dan persatuan tersebut sebagai pengejawantahan maknawi BHINNEKA TUNGGAL IKA akan terhambat apabila terdapat perbedaan wawasan, sikap, dan cara pandang dalam segolongan warga negara Indonesia keturunan Cina. Perbedaan wawasan yang berpangkal dari orientasi kebahasaan dan budaya Leluhur tersebut akan berdampak luas dalam sikap dan tingkah laku di semua aspek kehidupan bangsa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan :

1. Masih dipertahankannya bahasa Cina di daerah berpenduduk Cina secara tidak langsung dapat merupakan hambatan pokok dalam upaya mewujudkan satu kesatuan bangsa dalam segenap aspek kehidupan nasional sesuai GBHN perihal Wawasan Nusantara.
2. Penggunaan bahasa Cina sebagai bahasa pengantar sehari-hari me-

rupakan petunjuk masih adanya orientasi kehidupan yang berkiblat ke budaya Cina Daratan dan tipisnya orientasi masyarakat Cina dalam kebudayaan pribumi/Melayu. Orientasi tersebut menimbulkan perbedaan-perbedaan dalam sikap dasar, pandangan hidup, cara berpikir, dan cara bertindak/bertingkah laku di tengah-tengah masyarakat mayoritas Melayu sekitarnya.

3. Kondisi kecenderungan tebalnya orientasi ke kebudayaan Cina dan tipisnya orientasi ke kebudayaan setempat sebagaimana tercermin dari langgengnya penggunaan bahasa Cina dalam kehidupan masyarakat Cina erat kaitannya dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kuatnya pengaruh ajaran Tao dan Khong Hu Cu.
- b. Politik Pemerintah Penjajah Belanda yang memberikan peluang dan pemupukan sikap hidup yang eksklusif.
- c. Politik Pemerintah Penjajah Jepang yang merangsang meningkatnya semangat nasionalisme Cina sebagai akibat anti Barat.
- d. Kebijaksanaan Pemerintah Indonesia dalam rangka mewujudkan kesatuan dan persatuan bangsa baik sebelum maupun sesudah G.30 S/PKI atas penggunaan bahasa pengantar bahasa Cina di

Sekolah-Sekolah Cina, masih banyak hambatan.

- e. Kurangnya pengawasan dan pengendalian penggunaan bahasa Cina serta kurang berkembangnya kebudayaan setempat.

S a r a n :

Ada empat butir saran sebagai berikut:

1. Agar masyarakat WNI keturunan Cina menyatu dalam sikap dasar, pandangan hidup, dan cara berpikir/bertindak/bertingkah laku dengan seluruh masyarakat Indonesia umumnya, perlu digiatkan penghayatan Pancasila serta ber-P4 di lingkungannya.
2. Agar Pemda menggiatkan pengembangan budaya setempat dengan mengikut sertakan semua golongan masyarakat.
3. Secara historis dan psikologis maka dalam rangka pembentukan semangat kebangsaan Indonesia maka masalah pendidikan bagi generasi penerus WNI keturunan Cina di Indonesia perlu memperoleh prioritas utama.
4. Agar WNI keturunan Cina mampu menguasai bahasa Nasionalnya yakni bahasa Indonesia maka agar penggunaan aksara Cina dilarang tanpa kecuali.

PENUTUP.

Bersama lampiran-lampiran lain, khususnya Daftar Riwayat Hi-

dup Robert Th. Kodong, penulis memaparkan pula Ringkasan Permasalahan dan hal-hal yang ditemukannya.

Bab V sebagai inti skripsi masih harus larut dengan paparan bab-bab sebelumnya sehingga analisis tentang kaitan Wawasan Nusantara dengan budaya penggunaan bahasa Cina bagi WNI keturunan Cina dan WNA Cina di Indonesia menjadi tenggelam oleh "duplikasi" paparan bidang kebudayaan dan pendidikan tersebut. Duplikasi tersebut menjadi lebih terang karena bunyi bab tambahan berjudul "Ringkasan" pun kembali mengemukakan masalah-masalah terdahulu. Dalam saran butir 4 pun terdapat kerancuan makna antara aksara dan bahasa

sehingga dipadankannya serta diantithesekannya. Dan dalam menjabarkan situasi serta kondisi Poltabes Medan, penulis tidak sekaligus memberikan penegasan atas adanya kesamaan dengan Pontianak/Kalimantan Barat, dengan pemaparan secara Astagatra yang dikaitkan dengan Ketahanan Nasional (Bab F GBHN).

Meskipun demikian identifikasi penulis yang merupakan bagian dari visi serta prediksinya atas keterkaitan Wawasan Nusantara dengan budaya pemakaian bahasa Cina, secara implisit telah menemukan titik-titik kerawanan, hambatan, kecenderungan ancaman/gangguan, tantangan, dan dampak-dampak negatif yang berkembang yang harus diwaspadai dengan saksama.

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

* When love and skill work together, we may expect a masterpiece.